

**PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP PT FORESTA LESTARI
DWIKARYA DI DESA KEMBIRI, KECAMATAN MEMBALONG
(DARI *COLLECTIVE ACTION* KE RESOLUSI KONFLIK)**

Masitoh Rangkuti

Universitas Bangka Belitung

Email: masitoh.rangkuti01@gmail.com

Ibrahim

Universitas Bangka Belitung

Email: iim_babel@yahoo.com

Sandy Pratama

Universitas Bangka Belitung

Email: sandy-pratama@ubb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengangkat tentang konflik agraria yang terjadi antara masyarakat desa kembiri dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tepatnya PT Foresta Lestari Dwikarya yang terletak di Desa kembiri kecamatan Membalong kabupaten Belitung Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Konflik ini bermula ketika perusahaan melakukan *replanting* penebangan untuk penanaman kembali namun pihak masyarakat tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan tidak ada transparansi dan sosialisasi dari pihak perusahaan. Dalam hal ini masyarakat menuntut hak mereka dengan 20% plasma dan meminta pengukuran ulang HGU kembali dikarenakan adanya kejanggalan atas lahan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana bentuk perlawanan masyarakat terhadap pt foresta lestari dwikarya serta melihat apa saja dampak perlawanan yang diakibatkan oleh konflik ini. Penelitian ini menggunakan teori Contentious Politics oleh sidney Tarrow sebagai landasan dasar penelitian, terdapat empat indikator tahapan dalam perlawanan yakni, mobilisasi sosial, koalisi dan aksi kolektif, perlawanan, dan negosiasi resolusi konflik. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang sumber data primernya berasal dari wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data lanjutan, dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik snowball sampling.

Kata Kunci: Perlawanan Masyarakat, Collective Action, Resolusi Konflik

ABSTRACT

This research examines the agrarian conflict between the community of Kembiri Village and the palm oil plantation company PT Foresta Lestari Dwikarya, located in Kembiri Village, Membalong District, Belitung Regency, Bangka Belitung Province. The conflict began when the company conducted replanting (tree cutting for replanting purposes) without informing the community, as there was no transparency or socialization from the company. In this case, the community demanded their rights, including 20% plasma (land allocation for the local community) and requested a remeasurement of the HGU (Hak Guna Usaha - land use rights) due to irregularities concerning the community's land. The purpose of this study is to investigate the form of community resistance against PT Foresta Lestari Dwikarya and to identify the impacts of this resistance caused by the conflict. This study uses Sidney Tarrow's Contentious Politics theory as the foundational framework, which includes four indicators of the resistance stages: social mobilization, coalitions and collective action, resistance, and conflict resolution negotiation. This study employs a qualitative descriptive research method, with primary data sources gathered from interviews and documentation to obtain further data. The researcher used snowball sampling technique to determine the informants.

Keywords: Community Resistance, Collective Action, Conflict Resolution.

PENDAHULUAN

Lahan ini mengalami penyusutan pada setiap tahunnya dan semakin menurun. Penyebab berkurangnya lahan yang dapat dikelola dan digarap oleh petani yakni diakibatkan oleh konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Hal ini tidak dapat dipungkiri konflik agraria menyebabkan bagian lahan yang dimiliki oleh masyarakat berkurang. konflik sudah melekat pada setiap kehidupan manusia oleh karena nya, konflik sering terjadi dalam lingkup kecil maupun lingkup yang lebih luas. Seperti halnya kelompok, organisasi atau instansi, komunitas, masyarakat, politik, negara sampai pada hubungan internasional.

Dalam kehidupan manusia konflik merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan pendorong dalam terjadinya dinamika yang ada pada masyarakat baik pada bidang sosial maupun politik dan budaya.

Konflik tidak dapat dihindari dalam kehidupan karena akan terjadi pada siapapun, kapanpun, bahkan dimanapun, oleh siapapun baik konflik yang bersifat vertikal atau horizontal (Efferi, 2013). Dengan demikian, kondisi ini akan terjadi ketika muncul ketidakcocokan antar nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain (Killman dan Thomas 1978). Salah satu konflik agraria yang terjadi di Indonesia adalah konflik Perjuangan Masyarakat desa kembiri dalam menuntut hak dan keadilan atas tata kelola perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya di Desa Kembiri, kecamatan Membalong, kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Berawal dari tahun 1994, PT Foresta Lestari Dwikarya telah beroperasi di atas hamparan lahan HGU (hak guna usaha) seluas kurang lebih 11.000 hektar, terbentang dari 6 Desa di Kecamatan Membalong yakni, Kembiri, Perpat, Simpang Rusa, Lasar, Membalong, dan Tanjung Rusa. Aktivitas utama PT ini adalah proses penanaman, perawatan, hingga pemanenan kelapa sawit, yang kemudian proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak sawit *crude palm oil* (CPO) dan inti sawit *palm kernel oil* (PKO). Potensi besar yang dimiliki oleh lahan desa ini untuk ditanami sawit, tampaknya menjadi pengharapan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, namun konflik yang terjadi pada kasus ini, yang melibatkan antara PT Foresta dengan Masyarakat Desa Kembiri menandakan adanya beberapa hal problematis dalam dinamika tata kelola perkebunan kelapa sawit terutama mengenai regulasi terkait pada skema penerapan Plasma dan *Corporate social responsibility* (CSR) atas perkebunan kelapa sawit (Widiyanto, 2023).

Berdasarkan hasil diskusi publik menyatakan bahwa, pada tahun 1983 peneliti dari fakultas kehutanan UGM melakukan penelitian studi kelayakan tanah untuk pemanfaatan tanaman pangan dan perkebunan di daerah tingkat II Belitung bahwa pengembangan perkebunan kelapa sawit ini merupakan salah satu jalan alternatif peralihan dari kegiatan pertambangan timah di pulau belitung, termasuk juga pada desa kembiri kecamatan Membalong provinsi kepulauan bangka belitung yang Ekonomi utamanya adalah berkebun (pos belitung.co). Kendati begitu, pola pengembangan dan manajemen perusahaan yang tidak mendasarkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat menjadi faktor pemicu lahirnya pertentangan konflik, sehingga masyarakat melakukan gerakan perlawanan yang menunjukkan adanya bentuk kekecewaan yang dirasakan masyarakat.

Mengenai latar belakang tersebut penelitian ini mencoba melihat bentuk gerakan perlawanan masyarakat desa Kembiri dengan Pihak Perusahaan PT Foresta serta melihat dampak perlawanan yang diakibatkan oleh perlawanan masyarakat. Dimana saat ini Konflik ini cukup menjadi perhatian serius dan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan pembangunan pedesaan. Pentingnya penelitian ini terletak pada beberapa alasan yakni, pertama konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga pihak perusahaan dapat mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi di tingkat lokal, mengganggu perdamaian dan kesejahteraan masyarakat desa, kedua konflik agraria seringkali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang bertentangan termasuk masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan sehingga diperlukan pendekatan yang holistik untuk penyelesaiannya.

Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dalam penyelesaian konflik di Desa Kembiri sehingga memperkuat pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul, “Perlawanan Masyarakat Terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya Di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong (Dari *Collective Action* Ke Resolusi Konflik).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan oleh sejumlah individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Kusumastuti dan Khoiron, 2019). Etimologi dari penelitian kualitatif di atas menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menyajikan data yang bersifat eksploratif untuk mendeskripsikan suatu perilaku, peristiwa ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur statistik atau dengan metode pengukuran.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli-September 2024.

Target/Subjek Penelitian

Setiap penelitian kualitatif wajib hukumnya punya informan. Informan dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang detail mengenai permasalahan penelitian ini dalam kata lain informan ini adalah sebagai subjek dari penelitian. Adapun klasifikasi informan adalah, informan kunci, informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pemilihan informan dengan teknik *snowball sampling*, yang telah ditentukan terlebih dahulu identiikasinya. Tahapan untuk memperoleh informan dengan teknik ini yaitu cukup di awal peneliti menentukan dua atau tiga informan saja. Kemudian dari informan tersebut akan diperoleh mengenai informan informan selanjutnya yang nantinya lebih memahami seluk-beluk permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Jumlah informan tidak dibatasi berdasarkan kuantitas melainkan berdasarkan pengumpulan data. Jika data yang dikumpulkan telah menjawab permasalahan penelitian, maka peneliti akan menghentikan proses pencarian informasi dan informan.

Prosedur

Penelitian ini membagi jenis dan sumber data menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau yang berasal dari tangan pertama dan data primer ini biasanya adalah data yang diperoleh dari responden melalui, kelompok fokus dan data hasil wawancara peneliti dengan informan tergantung teknik pengumpulan data yang digunakan (Nurdin, 2018).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam sebuah penelitian. Data ini diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dan data sekunder biasanya data yang berasal dari catatan atau dokumentasi dalam sebuah perusahaan atau instansi seperti absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, peraturan dan lain sebagainya (Hartati, 2019).

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun yang menjadi sumber data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk dalam rangka memperoleh data dan informasi yang memadai maka peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi (pengamatan) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis observasi observasi partisipan terbatas. Teknik ini sengaja dipilih untuk membantu peneliti memberikan deskripsi tentang kehidupan sosial masyarakat Desa Kembiri.

2. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan salah teknik pengumpulan data guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Wawancara ini dilaksanakan dengan wawancara mendalam dan pertanyaan pertanyaan tersebut akan ditunjukkan pada informan kunci dan informan biasa. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Instrumen (pedoman wawancara) tertuang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti fisik terkait judul penelitian ini. Dokumentasi dapat berupa gambar realitas keseharian masyarakat yang diteliti. Kemudian dokumentasi juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan arsip-arsip yang terkait dengan judul penelitian ini nantinya. Arsip-arsip bisa berupa berita koran, gambar, surat-surat, tulisan ilmiah berita online, atau dokumen lain yang nantinya membantu dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menerapkan model *interactive analysis* yang telah dipresentasikan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang dilakukan pra penelitian guna membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian ini. Proses ini terjadi saat pembuatan proposal penelitian hingga penelitian nantinya penelitian selesai.

2. Penyajian Data

display data (penyajian data). Dalam penyajian data ini akan ditampilkan informasi yang tersusun dan terstruktur, sehingga diperoleh kesimpulan dan strategi untuk resolusi konflik agraria.

3. Penarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi atas data yang diperoleh dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Gerakan Perlawanan Masyarakat Terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya di Desa Kembiri

Sejak tahun 1994 PT Foresta Lestari Dwikarya beroperasi dengan aktivitas utama PT ini adalah proses penanaman, perawatan hingga pemanenan kelapa sawit kemudian terdapat juga proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak sawit (CPO) dan inti sawit (PK). PT Foresta Lestari Dwikarya berdiri di atas hamparan lahan hak guna usaha (HGU) seluas kurang lebih 11.000 Ha terbentang di 7 Desa, salah satunya ialah Desa Kembiri, dan menjadi desa terluas yang dipakai oleh pt foresta lestari dwikarya dengan lahan mencapai 6000-an Ha. Masyarakat desa kembiri kecamatan Membalong provinsi kepulauan bangka belitung, mayoritas dengan ekonomi utama ialah perkebunan tentunya bertumpu pada lahan/ tanah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan guna mempertahankan kehidupan mereka. Namun pada akhirnya karena jumlah manusia semakin bertambah dengan pesat maka lahan menjadi sumber daya yang langka sehingga perubahan pengguna lahan tidak bisa dihindari akibat jumlah manusia yang semakin meningkat dan kebutuhan manusia yang semakin menanjak.

Berlanjut di tahun 2023 persoalan konflik antara masyarakat dengan perusahaan PT Foresta lestari dwikarya mulai muncul, beberapa persoalan diantaranya ketika masyarakat menuntut hak mereka atas plasma 20% dan terdapat indikasi adanya lahan di luar dari hgu yang diklaim masyarakat sebagai lahan adat. Bermula ketika masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk pertama kalinya pada tanggal 5 juli 2023 di depan kantor PT Foresta Lestari Dwikarya, namun dengan aksi gerakan ini sama sekali tidak ada respon dari perusahaan.

Berdasarkan data dilapangan, bahwasanya konflik diawali dengan ketika pihak perusahaan membuka waduk dengan alasan sebagai tempat pembibitan. Kemudian

di tanggal 2/3 Juli ternyata mereka mendatangkan alat untuk melakukan penebangan/*replanting*, dan masyarakat tidak tahu tentang itu. Muncullah adu argumen antara pihak perusahaan dan masyarakat kemudian pihak perusahaan melakukan pemberhentian setelah melakukan kesepakatan. Dalam pernyataan salah-satu informan menyebutkan juga bahwa Bupati mengatakan tidak ada pihak perusahaan melakukan perpanjangan izin dan beliau juga tidak ada mengeluarkan surat rekomendasi. Namun hal ini sangat tidak mungkin terjadi, sementara itu di tanggal 5 juli 2023 ternyata 1 hak guna usaha (HGU) telah di perpanjang di tahun 2018, dan masyarakat tidak tahu akan hal itu, sehingga masyarakat mulai emosi dan sampai saat ini belum ada kejelasan tentang surat rekomendasi tersebut.

Berlanjut di tanggal 10 juli 2023, masyarakat kembali merencanakan aksi demonstrasi di depan kantor bupati dengan tuntutan mengenai 20% plasma yang wajib dikeluarkan PT Foresta Lestari Dwikarya dan juga meminta pemerintah daerah mengusut masalah perizinan dan perpanjangan HGU perusahaan. Dalam hal ini bupati belitung mendukung perjuangan masyarakat, bahkan dalam *statement* nya menyatakan akan memimpin penebangan pohon-pohon sawit perusahaan bersama masyarakat jika perusahaan tersebut tidak mengabdikan tuntutan masyarakat (www.posbelitung.co).

Dalam hal ini, masyarakat melakukan hal ini karena didasari oleh pernyataan yang diujarkan oleh Bupati Belitung, dimana masyarakat mendapat arahan dan keberanian untuk menjalankan aktifitas yang sebagaimana mestinya disebutkan, namun hal ini ternyata menjadi puncak permasalahan yang berimbas dengan penangkapan 11 pejuang keadilan masyarakat, yang berasal dari Dusun Air Gede Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Belitung Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Dalam gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat terdapat beberapa tahapan- tahapan indikator dalam melihat bentuk gerakan perlawanan dengan mengguakan kacamata teori *contentious politics* oleh Sidney Tarrow.

1. Mobilisasi Sosial

Dalam teori Sidney Tarrow mobilisasi sosial merupakan bagian integral dari gerakan sosial dan politik yang bersifat *contentious*. Dalam hal ini menunjukkan bahwa mobilisasi sosial adalah salah satu elemen kunci dalam keberhasilan suatu gerakan dan perlawanan untuk mencapai tujuannya. Proses mobilisasi sosial dalam masyarakat Kembiri yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial di Desa Kembiri melibatkan

serangkaian langkah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan tuntutan atau perubahan tertentu:

- a. Alasan Tuntutan Masyarakat, Ketidakadilan Sosial, hal ini menjadi faktor utama dimana, masyarakat merasa bahwa janji-janji dari PT Foresta Lestari Dwikarya tidak dipenuhi dengan baik. Janji untuk membuka lapangan pekerjaan, memajukan desa, dan mensejahterakan masyarakat sekitar tidak terlaksana sesuai yang diharapkan. Tidak adanya bantuan yang signifikan dari perusahaan tersebut untuk pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat setempat yang menjadi pemicu awal.
- b. Strategi Masyarakat, Dalam strateginya masyarakat Desa Kembiri membentuk komunitas atau kelompok yang terorganisir dengan jelas untuk mengkoordinasikan aksi protes dan tuntutan mereka terhadap perusahaan sawit. Dengan demikian, mereka dapat bersatu dalam mendesak agar hak-hak mereka diakui. Desa Kembiri bekerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga advokasi atau LSM untuk mendapatkan dukungan, bantuan hukum, dan advokasi dalam menyelesaikan konflik dengan perusahaan
- c. Tujuan dari adanya mobilisasi sosial di Desa Kembiri dalam menghadapi konflik dengan PT Foresta Lestari Dwikarya yakni mencapai beberapa tujuan yang mendasar dan penting bagi masyarakat setempat. Salah-satunya memperjuangkan hak dan keadilan masyarakat Desa Kembiri, memperjuangkan hak-hak mereka yang dianggap dilanggar oleh PT Foresta Lestari Dwikarya. Mereka berusaha memastikan bahwa hak atas tanah, lingkungan, dan kehidupan mereka dihormati dan dilindungi.

2. Koalisi dan Aksi Kolektif

Tahapan koalisi dalam salah-satu indikator teori Sidney Tarrow dapat diidentifikasi berdasarkan dinamika dan kekuatan koalisi yang terbentuk dalam pergerakan sosial masyarakat. dalam indikator koalisi bertujuan untuk memperjuangkan berbagai tuntutan dan kepentingan terkait dengan konflik yang terjadi di wilayah masyarakat. koalisi dalam perlawanan masyarakat Desa Kembiri yang mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan ini yang meliputi:

- a. Kesatuan Tujuan, Koalisi yang terbentuk dalam perlawanan masyarakat Desa Kembiri menunjukkan kesatuan tujuan yang jelas untuk menuntut

hak-hak mereka terkait dengan lahan plasma dan hak atas tanah dari PT Foresta Lestari Dwikarya. Kesatuan tujuan ini menjadi indikator kuat dari koalisi yang solid. Masyarakat Kembiri memiliki kesatuan tujuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka melalui berbagai tindakan, seperti melakukan blokade akses terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya, menggelar aksi damai, dan melibatkan tokoh adat dalam upaya penyelesaian konflik. Mereka menuntut pemenuhan janji perusahaan, persamaan hak, dan keadilan dalam distribusi manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut di wilayah mereka.

- b. Dukungan Solidaritas, dukungan solidaritas kepada masyarakat Kembiri dalam kasus PT Foresta Lestari Dwikarya mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk para tokoh adat, aktivis lingkungan, organisasi masyarakat, peran akademisi, dan sejumlah pihak yang peduli terhadap isu lingkungan dan hak-hak masyarakat. Dukungan ini mencerminkan kepedulian luas terhadap upaya masyarakat Kembiri dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menyelesaikan konflik yang terjadi dengan perusahaan tersebut. Para tokoh adat dari tujuh desa di sekitar Kembiri telah memberikan dukungan solidaritas dengan berbagai tindakan, seperti menggelar prosesi adat dan berkumpul untuk membahas penyelesaian konflik. Mereka memainkan peran penting dalam membimbing dan mendukung masyarakat dalam upaya perjuangan mereka. Selain tokoh adat, peran akademisi juga turut hadir dalam perjuangan masyarakat Desa Kembiri, contohnya perwakilan dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung, yang memberikan edukasi pengetahuan hingga membangkitkan semangat masyarakat Kembiri. Organisasi lingkungan dan aktivis juga turut memberikan dukungan solidaritas kepada masyarakat Kembiri.
- c. Struktur Jaringan yang Kuat, dalam indikator koalisi perlu memiliki struktur jaringan yang kuat dan terorganisir untuk memastikan berbagai anggota koalisi dapat berkolaborasi dan bergerak bersama dalam upaya penyelesaian konflik. Dalam menghadapi konflik dengan PT Foresta Lestari Dwikarya, masyarakat Desa Kembiri terorganisir dengan struktur jaringan yang kuat dan solid. Berbagai elemen masyarakat Desa Kembiri

terlibat dalam menghadapi konflik tersebut, termasuk tokoh adat, pemuda, perempuan, serta warga secara keseluruhan.

Dalam indikator teori Sidney Tarrow aksi kolektif berperan sebagai salah satu mekanisme yang digunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, menuntut perubahan atau memperjuangkan hak-hak tertentu yang dilakukan melalui berbagai bentuk aktivitas yang menunjukkan solidaritas dan keinginan bersama untuk mencapai tujuan bersama. beberapa bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembiri terhadap PT Foresta lestari dwikarya tersebut.:

- a. **Blokade Akses**, masyarakat Desa Kembiri melakukan blokade akses terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya sebagai tindakan protes atau penolakan terhadap perusahaan tersebut. Blokade akses ini merupakan salah satu bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh masyarakat sebagai respons terhadap ketidakpuasan mereka atas kebijakan, aktivitas, atau dampak yang diakibatkan oleh PT Foresta Lestari Dwikarya terhadap lingkungan atau masyarakat setempat. Dalam kasus ini, blokade akses perusahaan sawit tersebut dapat menjadi upaya masyarakat Desa Kembiri untuk menuntut perubahan, mendapatkan perhatian atas masalah yang mereka hadapi, sebagai cara untuk menekan perusahaan agar merespons tuntutan dan keprihatinan yang mereka sampaikan.
- b. **Demonstrasi dan Unjuk Rasa**, masyarakat Desa Kembiri telah melakukan demonstrasi dan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya. Salah satunya berawal Pada tanggal 5 Juli 2023, ketika ratusan warga Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, berkumpul di depan Kantor PT Foresta Lestari Dwikarya untuk menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menggunakan delapan truk dan dua mobil pikap untuk mobilisasi ke kantor perusahaan pada pukul 09.00 WIB. Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) bernama Martoni (wow belitung.com).
- c. **Audiensi dan Pertemuan**, masyarakat Desa Kembiri telah mengadakan beberapa audiensi dan pertemuan dalam perlawanan terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya. Berdasarkan informasi kegiatan audiensi dan pertemuan yang dilakukan dalam konteks perlawanan terhadap perusahaan yakni audiensi, masyarakat Desa Kembiri juga melakukan audiensi dengan

berbagai pihak terkait, seperti LSM, aktivis lingkungan, atau pihak terkait lainnya. Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan pemahaman lebih luas terkait isu-isu yang mereka hadapi dalam perlawanan terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya.

3. Perlawanan

Dalam teori Sidney Tarrow, indikator perlawanan merujuk pada gerakan sosial yang merupakan politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dengan para kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Sidney Tarrow memperkenalkan konsep gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lebih luas sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kekuasaan atau kebijakan yang dianggap merugikan. Setiap gerakan tentu memiliki tujuan, yang artinya tidak ada gerakan yang dilakukan tanpa memiliki dasar serta tujuan. Gerakan sosial dalam konteks perlawanan ini dapat mencakup berbagai bentuk protes, demonstrasi, blokade, aksi massa, dan upaya-upaya kolektif lainnya untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap merugikan atau tidak adil.

Begitupun sebaliknya pada masyarakat Desa Kembiri ketika dihadapkan pada perlawanan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pihak PT Foresta Lestari Dwikarya yang mencakup serangkaian Kronologis-kronologis salah-satunya yakni, 5 Juli 2023 dalam aksi pertama tersebut, ratusan masyarakat Desa Kembiri mendatangi kantor PT Foresta Lestari Dwikarya, dimana aksi ini bertujuan untuk menuntut sejumlah hak masyarakat yang selama ini dilalaikan oleh perusahaan, masyarakat ingin mendapatkan kejelasan terkait tuntutan mereka dan meminta melakukan pengukuran kembali. Rentetan demi rentetan terjadi pada kronologis konflik ini, dan puncak perlawanan terjadi pada tanggal 16 Agustus 2023 ketika masyarakat menerima laporan bahwa perusahaan melalui managernya, memerintahkan pekerjanya untuk memanen di lahan diluar HGU, yang sebenarnya tidak boleh disentuh berdasarkan kesepakatan antara masyarakat dengan PT Foresta pada tanggal 7 Agustus 2023 dalih yang disampaikan oleh manajer PT Foresta adalah bahwa instruksi pemanenan tersebut berasal dari manajemen pusat.

Kemudian masyarakat meminta untuk bertemu, atau setidaknya dapat berinteraksi langsung dengan manajemen pusat untuk meminta keterangannya. Namun

permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Melihat PT Foresta Lestari Dwikarya bertindak semaunya, amarah masyarakat yang sudah berkumpul di kawasan lahan dan kantor perusahaan sedari pagi hingga sore hari tidak terkontrol lagi. Massa secara spontan melakukan perusakan fasilitas, dan penebangan pohon sawit perusahaan. Meski di lapangan kejadian aparat kepolisian juga sudah berkumpul sedari awal, mereka sama sekali tidak bertindak apapun untuk meredam kemarahan massa dan hal ini mereka cenderung melakukan pembiaran di lokasi.

4. Negosiasi dan Resolusi Konflik

Negosiasi merupakan komunikasi politik yang dilakukan sebagai upaya pendekatan dan persuasi yang dilakukan suatu pihak untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain atau pihak yang di lobi yang dianggap memiliki pengaruh maupun wewenang dalam tujuan yang ingin dicapai (Saweli, 2023). Resolusi konflik merujuk kepada cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman tersebut sehingga melibatkan perbedaan pendapat, kepentingan, sampai pada terjadinya sebuah perlawanan. Dalam hal ini masyarakat desa kembiri melakukan berbagai pendekatan negosiasi sebagai upaya resolusi konflik salah satunya:

- a. Pendekatan Berbasis Masyarakat, Negosiasi dan resolusi konflik sebaiknya dilakukan dengan pendekatan berbasis masyarakat. Hal ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, masyarakat Desa Kembiri dan juga pihak pemerintahan, untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, solusi yang dihasilkan dapat lebih berkelanjutan dan memperhitungkan kepentingan semua pihak. Dalam hal ini masyarakat melakukan berbagai upaya. Berdasarkan sumber dan informasi yang dikumpulkan peneliti di lapangan upaya yang dilakukan oleh ketiga pihak terkait penyelesaian konflik ini terus dilakukan dari mulai FGD, sampai pada RDP semua telah diupayakan, namun solusi yang ditawarkan belum ada titik terang.
- b. Kesepakatan Win-Win, dalam negosiasi, penting untuk mencapai kesepakatan yang win-win, artinya kesepakatan tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan harus memahami aspirasi dan kebutuhan masyarakat Desa Kembiri, sementara masyarakat juga perlu memahami keterbatasan dan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, solusi yang ditemukan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

- c. Komitmen untuk Mencari Penyelesaian, selama proses negosiasi, kedua belah pihak harus memiliki komitmen untuk mencari penyelesaian yang adil dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara perusahaan, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Kejujuran, transparansi, dan saling menghormati merupakan kunci dalam mencapai resolusi konflik yang baik. Dalam hal ini komitmen untuk mencari penyelesaian pada konflik antar masyarakat dan perusahaan juga telah diupayakan baik pada pihak masyarakat, perusahaan, dan juga pemerintahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perlawanan masyarakat terhadap PT Foresta Lestari Dwikarya di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong (dari *collective action* ke resolusi konflik) yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hasil yang didapatkan dari penelitian ini, peneliti menghubungkan kasus ini dengan mengadopsi teori Sidney Tarrow dengan data- data yang didapatkan di lapangan, kendati begitu peneliti juga menyadari bahwa keterbatasan dalam memperoleh data pada pihak perusahaan terbatas, oleh karenanya pendapat peneliti terlimitasi oleh ketidakluasan peroleh data. Perlawanan terjadi diawali ketika perusahaan melakukan *replanting/* penebangan untuk ditanami kembali, namun masyarakat tidak mengetahui akan hal ini dikarenakan tidak ada sosialisasi ke masyarakat desa, rentetan-demi rentetan peristiwa akhirnya masyarakat menuntut hak 20% plasma, dan meminta pengukuran ulang dari jumlah (HGU) hak guna usaha. Pertemuan antara masyarakat dengan perusahaan tidak menghasilkan kesepakatan sehingga menimbulkan situasi semakin *deadlock*. Kesepakatan sempat terjadi ketika pihak perusahaan sepakat untuk tidak memanen buah sawit yang terindikasi diluar HGU, akan tetapi setelah seminggu kemudian pihak perusahaan tiba-tiba memanen buah tersebut dengan alasan arahan dari pusat, hal ini menyulut emosi masyarakat ditambah lagi ketika masyarakat ingin bertemu dengan pihak pusat, namun masyarakat hanya mendapat jawaban yang tidak jelas pula. Hingga pada tanggal 16 agustus 2023 terjadilah puncak perlawanan masyarakat Desa Kembiri dimana pembakaran, perusakan aset dan penebangan pohon terjadi yang menandai bahwa perusahaan bersama

pemerintah daerah belum mampu menciptakan ekosistem bisnis investasi yang ramah terhadap warga dan lingkungannya.

Disamping itu juga, kerusuhan yang menyebabkan terjadinya kerusakan aset perusahaan tidak terlepas dari buntu dan buruknya sistem kehumasan PT Foresta, sehingga relasi sosialnya begitu tegang dan eksklusif dengan masyarakat contohnya sulitnya membuka ruang publik dan ruang dialogis yang lebih interaktif dengan masyarakat lokal. Yang seharusnya komunikasi dan relasi emosional harus lebih dikedepankan ketimbang model sikap provokatif dan intimidatif, yang justru akan mengundang amarah dan kecewa masyarakat.

Hal ini memunculkan permasalahan baru ketika terjadi penangkapan 11 pejuang keadilan masyarakat Desa Kembiri, Kecamatan Membalong akibat dari puncak perlawanan tersebut, sehingga menimbulkan kasusnya semakin kompleks dan berlarut-larut. Maraknya konflik ini menjadi bukti penyelenggaraan perusahaan belum tertata, terutama juga peran dan fungsi pemerintah dalam melakukan penanganan konflik untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Masyarakat Kembiri memerlukan suatu pembaharuan dan kebijakan dalam pengelolaan perusahaan. Seharusnya dengan berdirinya perusahaan besar di desa tersebut membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera, namun hal ini mungkin menjadi permasalahan ketika masyarakat sudah tidak mempunyai lahan untuk berkebun karena lahan semakin berkurang, ditambah masyarakat semakin banyak dan kebutuhan semakin menanjak, dan perekonomian utama masyarakat Desa Kembiri adalah berkebun.

Segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kembiri dan juga pemerintahan masih berlanjut. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil negosiasi dan audiensi, serta lambannya penyelesaian konflik ini, menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dan komprehensif untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Saran

Saran yang peneliti tuliskan semoga dapat menjadi masukan dan bahasan pertimbangan dalam penentuan kebijakan di masa yang akan datang agar konflik yang seperti ini tidak terulang kembali dan juga mengingat konflik ini belum memiliki titik terang dan penyelesaian hingga sekarang. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah ini harus tepat. Kedua belah pihak harus duduk bersama untuk membahas masalah ini dan mencari kata sepakat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pihak

ketiga dalam mengatasi masalah ini juga harus netral, tegas, bijaksana dan adil dalam mengambil keputusan.

TENTANG PENULIS

Nama Masitoh Rangkuti, lahir di Tanjung Makmur, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatra Utara tanggal 01 Januari 2002. Alamat email penulis yaitu masitoh.rangkuti01@gmail.com Motto hidup penulis “ Hiduplah dengan sabar, ikhlas, syukur, dan bermartabat”

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumastuti, A. dan Khoiron, A.M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Karangrawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressido.
- Carlsson, L. (2000). *Policy Networks as Collective Action*. Policy Studies Journal 28 (3). 502-520.
- Citra, R.D. (2018). *Gerakan Reclaiming Perubahan Tanah Kas Desa Kel. Lakarsantri di Kota Surabaya*. Jurnal Ilmu Politik. Universitas Airlangga.
- Creswell, J.W. (2007). *Penyelidikan Kualitatif dan Desain Penelitian: Memilih diantara Lima Pendekatan (Edisi ke-2nd)*. Sage Publications, Inc.
- Dahnur, H. dan Susanti, R. (2023). *Kronologi Aksi Massa di Perkebunan Sawit Belitung yang Berujung Kendaraan dan Perkantoran Dibakar*. Belitung Kompas.com.
- Efferi, A. (2013). *Manajemen Konflik Dalam Lembaga Pendidikan*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Quality. 1(1).
- Fringka, Y. (2016). *Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi*. Masyarakat: Jurnal Sosiologi. 21(2). Article 4.
- Hendra, T. (2021). *Perlawanan Gerakan Tani Sumatera Selatan (Gts) (Studi Konflik Agraria Ptpn Vii Cinta Manis di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir)*. Universitas Sriwijaya.
- Irawan, Y.E., Gunawan, W., dan Sulaeman, M. (2022). *Tahapan Gerakan Sosial Sidney Tarrow dalam Kasus Serikat Petani Piondo Sulawesi Tengah*. Jurnal Analisis Sosial.
- Karlsson, L., 2000. Policy Networks as Collective Action. Policy Studies Journal 28 (3). 502–520.
- Lado, H.V. (2021). *Macam-macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya*. Jakarta, Tirto.id.
- Nurdin, I. dan Sri, H. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. <http://eprints.ipdn.ac.id/4510/>
- Pujiarto, E. (2023). *Gerakan Sosial Petani Kedungdendeng (Studi Kasus: Gerakan*

- Raja, A.N. (2019). *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan 12 (1).
- Ramadhini, F.N. (2023). *Proses Resolusi Konflik antara PT. Bangka Asindo Agri dan Masyarakat Kenangan Tahun 2019*. Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung.
- Sayogyo. (1991). *Sangketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Saweli. (2023). *Negosiasi Pembagian Lahan Tambang Inkonvensional (Studi Kasus pada Pertambangan Timah Inkonvensional di Desa Simpang Rusa, Kabupaten Belitung)*. Ilmu Politik. Universitas Bangka Belitung.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Susan, N. (2010). *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group; Jakarta.
- Tarrow, S. (1998). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Yudha, E., Gunawan, W., dan Sulaeman, M. (2022). *Tahapan Gerakan Sosial Sidney Tarrow Dalam Kasus Serikat Petani Piondo Sulawesi Tengah*. Jurnal Analisis Sosiologi. (Magister Sosiologi, Universitas Padjadjaran).
- Undang-undang, 2009. *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2P) nomor 14*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.
- Undang- undang, 2014. *Tentang Perkebunan nomor 18*. Presiden Republik Indonesia. Jakarta.